

SEBUAH KAJIAN AWAL TENTANG KETERKAITAN PASUKAN PARAMILITER DAN MILITER, DENGAN FAHAM MILITERISME DAN FASISME DI INDONESIA

Saafroedin Bahar*)

Sebagai suatu institusi dapat dikatakan bahwa jajaran militer Indonesia berasal dari satuan-satuan paramiliter yang tumbuh secara spontan di kalangan pemuda militan setelah beredarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan medio bulan Agustus 1945. Kenyataan tersebut mungkin berasal dari keragu-raguan pendiri negara untuk secara langsung membentuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, walaupun hal itu sudah tercantum resmi dalam pasal 10 UUD 1945. Kenyataan tersebut juga berdampak pada citra diri, doktrin, kebijakan, strategi, taktik, dan teknik militer yang mereka kembangkan kemudian. Setidak-tidaknya secara teori, militer Indonesia tidak pernah dirancang untuk beroperasi penuh sebagai institusi militer yang profesional. Kaitan dengan peran pasukan paramiliter dan masyarakat selalu menjadi pertimbangan. Keragu-raguan tersebut mungkin berkait dengan dua faktor penyebab.

Kenyataan penyebab pertama terletak pada latar belakang non militer dari kepemimpinan sipil. Walaupun ada beberapa orang anggota BPUPKI-PPKI yang mempunyai pengalaman militer tingkat lapangan dalam Legiun Mangkunegaran atau Tentara Pembela Tanah Air, namun tidak

seorang pun yang mempunyai visi yang jernih dan kemahiran komando atau staf pada tingkat satuan besar, misalnya tingkat nasional.

Dalam hubungan ini dapat dimengerti keheranan Mayor KNIL pensiun, Oerip Soemohardjo, sewaktu beliau berkata:

* Dr. Saafroedin Bahar, Direktur Center for the Study of Nations, Jakarta. Wakil Ketua Subkomisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Aneh, negara *zonder* tentara".

Di muna pun di dunia, militer memang merupakan suatu atribut keberadaan negara. Selain dari tulisan-tulisan Tan Malaka - seorang marxis, yang dengan sendirinya tertarik pada masalah revolusi dan pemberontakan bersenjata dan tidak pernah menjadi anggota kedua badan tersebut - praktis tidak ada pemikiran, apalagi tulisan, dari para pendiri negara yang berkaitan dengan bidang militer ini.

Faktor khusus yang mungkin menjadi pertimbangan mereka dalam menunda pembentukan militer reguler tersebut, yaitu kenyataan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, telah menyandang citra negatif sebagai kolaborator Jepang di mata tentara Sekutu. Kebijakan apa pun yang mereka ambil akan ditanggap sebagai pelaksanaan kebijakan militer Jepang, dan besar kemungkinan akan dibatalkan oleh pimpinan tentara Sekutu yang mulai mendatangkan pasukannya sekitar bulan September 1945. Lagi pula kedua pemimpin tersebut lebih menyukai pendekatan damai dalam upaya mencapai pengakuan terhadap kemerdekaan.

Pengalaman dan tekanan situasi akhirnya mendorong kedua pemimpin tersebut untuk

memberikan perhatian yang lebih besar kepada dunia militer ini, yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertanggung jawab dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang merupakan *public goods*. Awal Oktober 1945, dua bulan setelah proklamasi, Pemerintah mengeluarkan pengumuman terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Akhirnya dalam bulan Desember 1945 Presiden melantik dengan resmi seorang Panglima Besar, Kolonel Soedirman, yang dipilih oleh para komandan TKR yang datang dari seluruh Indonesia.

Faktor lain yang mungkin menyebabkan terlambatnya pembentukan satuan militer reguler adalah adanya semacam ketidakpercayaan mendasar terhadap kaum militer profesional, antara lain oleh karena mereka ini pernah berdinas dalam jajaran KNIL. Cukup besar reaksi dari kalangan komandan lapangan terhadap rencana pengangkatan perwira profesional ini dalam jajaran komando militer. Misalnya dalam kasus pengangkatan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan Kolonel T.B. Simatupang. Oerip tidak pernah diterima menjadi Panglima Besar walaupun beliau mempunyai latar belakang pendidikan, pangkat serta visi mengenai tugas berat itu. Sebagai gantinya,

dipilih dan diangkat Kolonel Soedirman, yang mempunyai latar belakang sebagai seorang guru Muhammadiyah.

Satuan-satuan paramiliter ini tidaklah sekaligus lenyap dengan terbentuknya pasukan-pasukan, reguler tersebut. Dalam banyak hal telah diadakan kerjasama dan koordinasi antara kedua pasukan itu. Namun tidak jarang pula terjadi konflik bersenjata antara kedua pasukan tersebut. Hal itu misalnya terjadi di Sumatera Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, serta Jawa Tengah.

Setelah penyerahan kedaulatan bulan Desember 1949, berbagai partai politik membentuk pasukan paramiliternya sendiri. Kali ini tidak lagi untuk tujuan perjuangan kemerdekaan, tetapi sebagai *pressure group* untuk mencapai tujuan politiknya masing-masing. Pasukan paramiliter partai-partai politik itu tampil aktif pada saat menjelang pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, atau untuk menekan pers dan media massa yang memberitakan hal-hal yang dinilai mereka merugikan dirinya, partai politik yang didukungnya, atau tokoh idola mereka. Praktek tersebut kelihatannya berlangsung terus sampai saat ini.

Ambivalensi terhadap Keberadaan Satuan-satuan Paramiliter

Adalah mustahil untuk me-

mahami suatu institusi dengan tepat tanpa memahami sejarah perkembangan serta karakter kepemimpinannya. Hal itu juga berlaku terhadap fenomena paramiliter dan militer di Indonesia. Jika diringkas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka menegakkan demokrasi yang lebih beradab, baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer, ada sikap ambivalen yang belum pernah dapat diselesaikan tentang peran dan hubungan antara satuan paramiliter dan militer.

Di kalangan sipil, ada kecenderungan kuat untuk tetap membentuk dan menggerakkan satuan-satuan paramiliter partai, walaupun secara formal mereka menolak peranan politik militer. Tidak jarang satuan-satuan ini dengan sadar dirancang untuk mempergunakan *uniform* mirip dengan satuan khusus dari militer dan digembleng secara mental dan fisik dalam suasana militeristik. Tidak dapat dibantah bahwa penguasaan terhadap satuan-satuan tersebut akan memberikan kekuatan massa yang diperlukan untuk mencapai tujuan politik, baik tujuan berjangka pendek, menengah, maupun berjangka panjang. Hampir tidak pernah terjadi bahwa suatu partai politik membubarkan dengan sukarela satuan-satuan paramiliternya ini. Kecenderungannya malah memperbanyak jumlah dan peng-

gunaan satuan-satuan sejenis itu.

Ambivalensi yang sama juga terlihat di kalangan militer. Walaupun sungguh-sungguh menginginkan adanya militer Indonesia yang benar-benar profesional, namun dalam doktrin mereka pada saat yang sama tetap tertantum keinginan sebagai "tentara rakyat", "tentara nasional" dan "tentara revolusi". Oleh karena itu militer Indonesia tidak pernah dapat tegas dalam menentukan posisi pasukan paramiliter ini. Walaupun sudah berulang kali dikeluarkan larangan bagi warga masyarakat sipil untuk menggunakan pakaian seragam yang mirip seragam militer, namun nyatanya larangan tersebut tidak dilaksanakan dengan konsisten. Berbagai kejadian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, selain membentuk satuan paramiliter resmi seperti Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra), pimpinan militer juga mengadakan kerjasama serta keterkaitan dengan pasukan paramiliter ini. Kerjasama serta keterkaitan tersebut tidak hanya untuk kegiatan pengamanan yang bersifat lokal, tetapi juga untuk operasi-operasi yang berlingkup propinsi dan berdimensi luas.

Kecenderungan militer untuk mempergunakan bantuan dari paramiliter ini dapat juga di-

sebabkan oleh karena keterbatasan personil dan dana. Adalah merupakan suatu kenyataan, bahwa militer yang selama bertahun-tahun mendapat tugas yang cukup beraneka ragam, harus bekerja dengan jumlah personil yang relatif kecil dan dengan peralatan yang sangat kurang.

Pimpinan militer harus mencari terobosan terhadap masalah itu. Mustahil mereka akan bersedia membubarkan demikian banyak pasukan paramiliter, yang sebagian justru mereka bentuk dan mereka tugaskan sendiri. Berbagai keterbatasan telah menyebabkan mereka harus membentuk dan menggunakan pasukan paramiliter ini sebagai tenaga bantuan operasi yang "murah meriah", dan tidak jarang memang amat efektif. Hanya pada pelaksanaan tugas-tugas yang menghendaki kemampuan profesional yang tinggi, seperti pada angkatan laut dan angkatan udara, fihak militer tetap harus mengandalkan jajaran pasukan regulernya sendiri, yang relatif lebih berdisiplin dan lebih terlatih.

Dalam tahun 1993 hal itu ditingkatkan ke tingkat kebijakan dan strategi, dengan mengembangkan apa yang disebut sebagai doktrin *small but effective force*. Secara implisit harus dapat diartikan sebagai upaya untuk

merampingkan struktur organisasi militer sambil sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasukan paramiliter. Pada saat yang bersamaan kebijaksanaan itu juga mengandung arti bahwa pasukan militer reguler harus direkrut dalam kuantitas dan kualitas profesional yang memadai. Dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi inilah beberapa komando wilayah pertahanan (kowilhan) dan komando daerah militer (kodam) dibubarkan. Sebagai akibatnya, rentang kendali kodam yang ada telah menjadi terlalu lebar, sehingga justru menjadi tidak efektif.

Kebijaksanaan yang lebih profesional ini bukannya tanpa risiko. "Ongkos" yang harus dibayar militer terhadap kebijakan yang walaupun berciri profesional namun dalam konteks Indonesia agak bersifat utopian ini, adalah sewaktu mereka harus menghadapi huru-hara bulan Mei 1998, konflik horizontal di kepulauan Maluku awal tahun 1999, dan disusul oleh pelaksanaan jajak pendapat di [propinsi] Timor Timur bulan Agustus 1999. Dalam ketiga kasus yang merupakan *cause celebre* ini jajaran militer Indonesia berada pada posisi kurang personil, kurang peralatan, kurang koordinasi, dan kurang kemampuan komando dan pengendalian.

Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa kinerja militer Indonesia dalam mengadakan operasi di daerah-daerah tersebut kurang mengesankan. Bahkan terdapat kesan, bahwa tekanan psikologis yang berat, yang sering terdapat di daerah operasi, telah menyebabkan terjadinya kemerosotan dan moril pasukan, yang dapat merupakan sebab dari terjadinya rangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*grave violations of human rights, crime against humanity*).

Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara, maupun tamtama. Sebagai akibatnya, secara gradual telah terjadi alienasi antara jajaran militer dengan masyarakat di sekitarnya. Kecintaan dan nama baik yang diperoleh melalui peran sebagai tentara nasional dalam era perjuangan kemerdekaan, telah beralih menjadi citra yang lebih negatif, yaitu sebagai satuan pelanggar hak asasi manusia. Keadaannya telah sedemikian rupa sehingga tidak jarang terjadi serangan langsung warga masyarakat terhadap personil dan instalasi dinas militer.

Pasukan Paramiliter, Militerisme, dan Fasisme

Ditinjau dari segi ilmu politik,

kecenderungan pada berbagai kalangan sipil untuk menggunakan atribut militer, membentuk pasukan paramiliter, serta untuk mempergunakannya untuk tujuan-tujuan politik dapat dipandang sebagai refleksi dari "ideologi" militerisme. Menurut Alfred Vagts (1959) gejala militerisme tersebut terutama terlihat pada negara-negara yang menganut paham fasisme, seperti Nazi Jerman dan Fasis Italia sebelum Perang Dunia Kedua.

Militerisme dapat menghinggapikan kalangan sipil maupun kalangan militer. Vagts menengaraikan adanya gejala yang disebutnya sebagai *militarism of the civilians*, militerisme orang sipil. Mau tidak mau struktur organisasi, prosedur, serta sistem pembinaan jajaran militer profesional, akan cenderung bersifat militeristis dan otoritarian. Doktrin Perjuangan TNI-AD *Tri Ubaya Cakti* (1966) mengakui bahwa sistem pembinaan militer ke dalam bersifat otoriter-konstruktif; apapun yang dimaksud dengan istilah itu.

Pada dasarnya militerisme tidak mentolerir otonomi, independensi dan kemajemukan, yang justru menjadi ciri khas demokrasi. Dalam tatanan yang militeristik, setiap orang dan setiap golongan harus ditata dalam barisan yang rapi, berdisiplin, serta taat pada perintah seorang

pemimpin kharismatik, apa pun nama dan gelarnya secara formal. Dengan demikian, eksistensi dan penggunaan dari pasukan paramiliter ini tidaklah dapat ditelaah terpisah dari konteks ideologi serta struktur kenegaraan yang melingkupinya. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa adanya pasukan paramiliter ini merupakan suatu indikasi dari kecenderungan anti demokrasi dalam suatu bangsa.

Oleh karena itu besar manfaatnya bagi pembangunan kehidupan demokrasi yang beradab di Indonesia, untuk mengadakan kajian kritis terhadap kandungan paham fasisme dari berbagai golongan yang ada di Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa sungguh jarang ada golongan yang benar-benar terbebas dari bibit paham fasisme ini. Bahkan organisasi-organisasi yang secara formal bernafaskan keagamaan, atau yang secara eksplisit menyatakan diri berjuang demi "demokrasi", yang seyogyanya menjauhkan diri dari kecenderungan militeristis dan fasistis itu, tidak jarang di bawah tokoh-tokoh tertentu malah mengalami transformasi menjadi organisasi fasistis dan militeristis.

Para pendiri republik sangat sadar mengenai bahaya fasisme ini. Dalam berbagai tulisannya sebelum tahun 1945, Ir. Soekar-

no telah memperingatkan bangsanya tentang bahaya fasisme ini. Dalam penjelasan terhadap pasal 23 UUD 1945 para anggota BPUPKI-PPKI secara eksplisit memperingatkan bahaya fasisme ini, di mana semua masalah diputuskan oleh pemerintah belaka.

Namun ada fenomena yang menarik untuk dicermati. Para pemimpin - baik sipil maupun militer - yang sedang berjuang untuk melawan kezaliman, menolak fasisme pada saat mereka belum berkuasa. Namun sengaja atau tidak sengaja mereka kemudian mengalami transformasi sewaktu sudah memegang tampuk kekuasaan, sampai mereka kemudian ditentang oleh kelompok baru yang menolak fasisme mereka itu. Sejarah politik Indonesia modern sekarang berulang dalam siklus yang bagaikan tidak ada ujungnya ini.

Demikianlah, Ir Soekarno yang wanti-wanti memperingatkan bangsanya mengenai bahaya fasisme, setelah berkuasa justru mengembangkan sendiri sejenis doktrin fasisme, yang disebutnya sebagai doktrin pemimpin besar revolusi. Doktrin ini tidak terlalu jauh berbeda dari konsep *Il Duce*-nya Benito Mussolini, atau konsep *der Fuhrer* dari Adolf Hitler. Perkembangan yang sama dapat menghinggapi para pemimpin sipil yang lain setelah

berkuasa, misalnya dengan memasyarakatkan konsep bahwa tokoh yang bersangkutan adalah seorang *wali*, atau tokoh supernatural sejenis itu.

Irasionalisme dan Personalisme sebagai Ciri-ciri Penting Fasisme

Amatlah menarik untuk memperhatikan bahwa fasisme hampir selalu terkait dengan irasionalisme dan personalisme. Fasisme dalam berbagai bentuknya hampir selalu mengembangkan suatu mitos yang bersifat irrasional, sebagai suatu cara untuk mengikat kesetiaan membuta dari massa. Personalisme melembagakan mitos itu pada loyalitas tanpa reserve pada seorang pemimpin.

Dapatlah dimengerti bahwa irasionalisme serta personalisme ini akan tumbuh subur pada saat massa rakyat berada pada suasana tidak pasti dan memerlukan pegangan yang tegas dari seorang tokoh. Baik fasisme Italia maupun naziisme Jerman tumbuh setelah Perang Dunia I dan sebelum Perang Dunia II, dipimpin oleh orator-orator yang mampu mengagitasi massa. Dalam konteks Indonesia, dalam perlawanannya terhadap kecenderungan fasistis dari Presiden Soekarno, mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta telah

memperingatkan bahwa sistem kepemimpinan yang sangat personalistik, yang dibangun oleh Ir. Soekarno akan lenyap bersamaan dengan tiadanya Soekarno.

Banyak pengamat menengara-
rai bahwa kecenderungan fasis-
tis ini dipengaruhi oleh latar be-
lakang budaya politik seorang
pemimpin. Seorang pemimpin
yang berlatar belakang budaya
politik egalitarian, mungkin agak
sulit untuk mendorongnya men-
jadi seorang fasis. Mereka tidak
ideologically of mentally equipped
untuk memikul beban kekuasaan
negara yang demikian besar. Se-
baliknya, seorang pemimpin
yang berlatar belakang budaya
otoritarian, sungguh amat sulit
untuk mencegahnya agar tidak
menjadi fasisis.

Pada umumnya terlihat baha-
wa dari segi budaya politik,
masyarakat Indonesia yang ber-
diam di daerah luar Jawa, lebih
cenderung pada budaya politik
egalitarian dibandingkan den-
gan masyarakat Indonesia yang
berdiam di Jawa. Banyak faktor
yang mempengaruhi kecender-
ungan tersebut, antara lain
faktor sejarah, agama, dan kesu-
sasteraan. Dengan demikian,
tokoh-tokoh pemimpin nasional
yang berasal dari luar Jawa, se-
perti Mohammad Hatta, Mu-
hammad Yamin, Syahrir, Mo-
hammad Natsir, BJ Habibie dari

kalangan sipil, atau T.B. Simatu-
pang dan A.H. Nasution dari
kalangan militer kelihatannya
lebih nyaman dengan suatu
tatanan demokrasi yang bersifat
pluralistis.

Sebaliknya, tokoh-tokoh pe-
mimpin nasional yang berasal
dari latar belakang budaya poli-
tik Jawa, seperti Presiden Soekar-
no dan Jenderal Besar H.M. Soe-
harto, cenderung bersifat otori-
tarian dan fasisis, baik secara
konseptual maupun dalam sikap
dan perilakunya. Hanya mereka
yang secara pribadi mempunyai
jiwa demokratis yang kuat, se-
perti Hamengku Buwono IX, da-
pat terbebas dari beban kultural
tersebut.

Mengingat baru memerintah
kurang dari satu tahun, kita be-
lum dapat mengambil kesimpul-
an final mengenai Presiden Ab-
durrahman Wahid. Namun ba-
nyak kalangan merasa risau de-
ngan gaya kepemimpinan be-
liau, yang seakan-akan terobsesi
dengan adanya konspirasi yang
akan menjatuhkannya, serta ke-
gemarannya untuk menggu-
nakan apa yang disebut sebagai
hak prerogatif Presiden. Jika
tidak hati-hati, beliau dapat
mengalami nasib tragis yang
sama dari presiden pertama dan
kedua. Namun masih cukup
waktu bagi beliau, serta jajaran
pendukungnya, untuk menata
gaya kepemimpinan yang lebih

sesuai dengan tuntutan zaman reformasi dewasa ini.

Demokrasi, antara Idealisme dan Kenyataan

Demokrasi dirumuskan oleh Abraham Lincoln sebagai *government of the people, for the people, and by the people*. Walaupun dewasa ini tidak ada masyarakat, bangsa atau negara yang secara eksplisit menolak demokrasi namun baik dalam teori maupun dalam praktek, banyak keraguan terhadap *efficacy* dari demokrasi tersebut. Proses demokratisasi mempunyai sejarah yang amat panjang, yang tidak selalu berlangsung secara mulus.

Orang-orang Yunani kuno, misalnya, lebih cenderung mencurigai demokrasi, dan lebih suka dengan aristokrasi, yang dipimpin oleh seorang arif bijaksana, yang mereka sebut sebagai *the philosopher-king*. Dalam pandangan mereka, sungguh sulit dibayangkan bahwa orang kebanyakan dapat dipercaya untuk menjalankan pemerintahan, yang memerlukan kecanggihan dan ketrampilan. Demikian juga halnya dengan para bangsawan Inggris dalam abad ke-13, memahami hak demokrasi sebagai *privilege* dari kaum bangsawan yang membayar pajak. Beberapa hak demokrasi yang dapat diper-

oleh dari Raja John Lackland, terkait dengan wawasan imbalan politik dari pembayaran pajak para bangsawan ini. Demikianlah, mereka menyatakan bahwa *no taxation without representation*. Pandangan yang sama kelihatannya juga dianut oleh para *the Founding Fathers* dari Republik Amerika Serikat, suatu negara yang juga dipandang sebagai pelopor demokrasi.

Sejarah menunjukkan bahwa momentum kuat ke arah demokrasi baru diperoleh sebagai reaksi terhadap kebiadaban fasisisme dan naziisme sebelum dan selama Perang Dunia II. Kebangkitan demokrasi beriringan dengan meluasnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Dalam dasawarsa terakhir tahun 1990-an dan dasawarsa awal tahun 2000-an, keduanya bahkan kelihatan telah menyatu dalam suatu arus besar peradaban baru umat manusia.

Walaupun diinginkan, ada hambatan obyektif dari kemunculan demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan. Hambatan obyektif tersebut ditampilkan secara sederhana oleh para teoretisi elite, seperti Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, C. Wright Mills, atau Suzanne Keller (Sherman, dan Kolker, 1987). Mereka menyatakan bahwa disadari atau tidak, keputusan politik hampir

selalu dibuat oleh sekelompok kecil golongan elite. Massa, atau orang banyak, tidak dilengkapi dengan visi yang luas, kemampuan ideologi yang canggih, sumber daya yang memadai, serta kemampuan kepemimpinan yang andal untuk memerintah orang lain. Dengan lain perkataan, mereka menyimpulkan bahwa adalah sudah nasib orang banyak untuk hanya berperan sekedar sebagai epigon dari kaum elite. Massa akan selalu mencari cantolan pada tokoh-tokoh kuat.

Para tokoh-tokoh kuat yang didambakan massa adalah mereka yang bukan saja akan memberikan pegangan yang tegas dalam suasana krisis yang tidak menentu, tetapi juga yang mampu memberikan ideologi yang relatif sederhana, memberi mereka janji akan kegemilangan masa depan, serta menciptakan kesan adanya kekuatan yang tidak terkalahkan. Tidaklah aneh bahwa tokoh-tokoh yang mampu memberikan kesan tersebut adalah tokoh-tokoh kharismatis. Selama kesan tersebut ada, dapat dikatakan bahwa kekuasaan kelompok elite terhadap massa akan terjamin.

Para tokoh elite yang kharismatis ini perlu secara khusus memberikan perhatian pada pentingnya penyediaan sumber daya ekonomi terhadap kelang-

sungan kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap massa. Max Weber merekomendasikan agar tokoh kharismatis sesegera mungkin mengkonversikan pengaruh pribadi yang abstrak tersebut menjadi penguasaan terhadap sumber ekonomi. Bagaimanapun juga, demikian Weber, pengaruh kharisma tidaklah stabil, dan karena itu tidak dapat diandalkan sebagai tumpuan sebuah rezim.

Menurut para teoretisi elite ini, secara struktural kaum elite ini terdiri dari tiga komponen, yaitu elite yang sedang berkuasa, tokoh subelite yang membantunya, dan para kontraelite yang menentangnya. Di kalangan kaum elite ini selalu ada rotasi antara mereka yang menjadi penguasa, dengan mereka yang membantu dan mereka yang menentang. Tokoh penguasa dapat merosot menjadi warga massa yang sama sekali tidak lagi mempunyai kekuasaan. Mereka dapat digantikan oleh para subelite atau tokoh-tokoh kontraelite. Diperlukan kewaspadaan khusus agar di akhir masa jabatannya mereka dapat kembali ke tengah masyarakat dengan selamat. Alternatif lainnya biasanya amat menyakitkan, seperti dituduh, atau dihukum, kalau pun tidak direvolusi oleh mereka yang pernah diperintahnya.

Dalam upaya mencapai dan

mempertahankan kekuasaannya, kelompok elite ini secara berganti-ganti akan mempergunakan kelicikan seekor musang (*the foxes*), atau keganasan seekor singa (*the lions*). Referensi yang umum dipakai oleh tokoh elite yang berhasil adalah pemikiran Sun Tzu dari Cina atau Niccolo Machiavelli dari Italia. Sungguh tragis menyaksikan bahwa tokoh-tokoh elite yang terlalu mementingkan aspek moral dalam kepemimpinan mereka, tidak dapat lama memainkan peran dalam panggung sejarah. Mereka terlalu naif untuk tugas itu, sehingga mudah diakali oleh seteru-seterunya.

Sebaliknya, walaupun diinginkan, namun demokrasi tidaklah menjamin munculnya suatu pemerintahan yang demokratis dan stabil. Beriringan dengan keinginan massa untuk tetap dipimpin oleh seorang tokoh kuat, juga oleh karena adanya fenomena rivalitas yang tidak terkendali di antara tokoh-tokoh subelite dan kontraelite yang menjanjikan mereka suatu kepemimpinan alternatif di masa datang.

Kelihatannya dunia kemanusiaan harus menerima kenyataan bahwa demokrasi ideal hampir mustahil dapat diwujudkan dalam dunia yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh idealisme ini.

Rivalitas dan Aliansi antara Elite Sipil dan Elite Militer

Adalah suatu kemustahilan bagi suatu kelompok elite untuk menyediakan seluruh sumber daya yang diperlukannya untuk tetap dapat memerintah massa dengan mantap. Pengembangan ideologi dan penyediaan sumber daya ekonomi, yang demikian penting peranannya bagi persatuan suatu masyarakat majemuk, merupakan bidang keahlian dari kaum terpelajar, cendekiawan, politisi, serta kaum pengusaha. Sebaliknya, penyediaan dan penggunaan kekuatan, yang diperlukan untuk penegakan hukum dan stabilitas, merupakan keahlian dari elite militer.

Oleh karena itu, demi kepentingan mereka sendiri, mau tidak mau, atau cepat atau lambat jajaran elite sipil dan elite militer ini akan mengadakan aliansi, sambil secara terus menerus berkonflik satu sama lain (Bahar, 1996). Elite sipil yang dalam taraf awal amat membenci peranan militer, akan terpaksa berkompromi dengan fihak militer, oleh karena mereka sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola *violence*. Sebaliknya elite militer yang benar-benar menginginkan peran profesional, akan terpaksa mengakui bahwa setidak-tidaknya gerak mereka akan dibatasi oleh jumlah ang-

garan yang merupakan bidang wewenang dari dewan perwakilan rakyat.

Sejarah peranan militer Indonesia menunjukkan kenyataan betapa jauhnya keterkaitan antara elite sipil dan elite militer ini. Bersamaan dengan adanya kecenderungan militeristik dari elite sipil, juga terlihat kecenderungan fihak militer untuk mengembangkan subideologi yang sesuai dengan kepentingannya sendiri, serta untuk membangun dan mengoperasikan berbagai badan-badan usaha ekonomi, baik dengan nama yayasan atau berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena tidak satu pun badan usaha milik militer ini yang telah *go public*, yang mensyaratkan keterbukaan dalam manajemen keuangan, amat sedikit yang diketahui umum mengenai kinerja badan-badan tersebut.

Aliansi elite sipil dan elite militer dalam penguasaan sumber daya yang sama-sama mereka perlukan itu dapat mencapai skala yang amat gigantis. Sumber daya raksasa tersebut dapat digunakan untuk tujuan baik maupun untuk tujuan yang tidak baik. Kelihatannya dalam hubungan inilah berkembangnya pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang umum dipandang sebagai salah satu faktor penyebab utama kebangkrutan

rezim yang berkuasa antara tahun 1966-1998 tersebut, sekaligus merupakan faktor pencetus keterpurukan Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Dengan meminjam istilah Samuel P. Huntington, kita dapat menyebut faktor KKN sebagai faktor utama penyebab *political decay* di Indonesia.

Dari berita dalam media massa yang mengungkap jaringan KKN ini, terdapat kesan kuat bahwa jaringan KKN ini telah menjadi suatu *invisible government*, yang menyangkut bukan hanya lembaga eksekutif di hampir semua tingkat, tetapi juga anggota-anggota badan legislatif, dan - lebih parah lagi - unsur-unsur *the criminal justice system*, seperti kepolisian, kejaksaan, para hakim, pengacara, sampai petugas lembaga pemasyarakatan. Hampir dapat dipastikan, bahwa mereka yang terlibat dalam kasus-kasus KKN ini, dan didukung oleh dana yang banyak, akan dapat membeli kebebasannya jika mengetahui "prosedur" dan "tarif" yang tepat.

Dalam kondisi amburadul seperti itu dapatlah difahami bahwa masyarakat awam mulai menunjukkan gejala kehilangan kepercayaan kepada hukum dan kepada aparat hukum. Jika ada kesempatan, mereka cenderung

melakukan *summary justice*, menjadi hakim sendiri, tidak jarang dalam manifestasi yang sangat mengerikan ditinjau dari segi kemanusiaan. Akhir-akhir ini bukanlah merupakan berita yang aneh terjadinya pembakaran sampai mati dari mereka yang tertangkap tangan mencuri, merampok, atau memeras. Ringkasnya, bersamaan dengan kemerosotan kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, serta keamanan, juga terdapat gejala yang lebih parah, yaitu kemerosotan wibawa hukum. Baik disadari atau tidak Indonesia dewasa ini sudah mengalami apa yang disebut di beberapa negara Afrika sebagai *failure of the state*, gejala gagal-negara. Secara populer, MPR menyebutnya sebagai disintegrasi nasional.

Prospek Demokratisasi dan Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia

Dengan merenungkan sejarah bangsa ini sejak Proklamasi Kemerdekaan 55 tahun yang lalu, memang ada landasan untuk pesimis mengenai masa depan bangsa, khususnya sehubungan dengan sinyalemen Johan Wolfgang von Goethe, yang sering dikutip oleh Mohammad Hatta. Goethe mengatakan bahwa kita hidup dalam kurun sejarah yang besar, tetapi tokoh-tokohnya adalah orang-orang

kerdil belaka. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah bangsa ini siap untuk hidup dalam suatu tatanan demokrasi modern, yang bercirikan keterbukaan, kemajemukan, otonomi, serta menghargai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun?

Lumayan banyak kekhawatiran dewasa ini terhadap kelangsungan proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi. Selain dari retorika, terdapat kesan kuat bahwa dalam banyak hal belum banyak yang berubah dari keadaan sebelumnya, baik dalam ideologi dan sistem, maupun dalam sikap dan perilaku. Banyak kalangan yang merasa kecewa, bahwa tokoh-tokoh yang sebelumnya menampilkan diri sebagai pendekar demokrasi, ternyata kemudian tidak jauh berbeda dengan tokoh otoriter yang digantikannya. Dalam beberapa hal bahkan terkesan jauh lebih buruk.

Tiga orang tokoh pemikir Indonesia, yaitu Drs. Mohammad Hatta, Prof. Mr. Dr. Soepomo, dan Y.B. Mangunwijaya, sama-sama sependapat bahwa dalam tatanan masyarakat tradisional, demokrasi hanya terdapat di tingkat desa. Di atas tingkat desa, tidak ada demokrasi. Yang ada hanyalah feodalisme dan otoritarianisme. Oleh karena itu Hat-

ta berjuang keras untuk meng-golkan beberapa pasal dalam UUD 1945 yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, khususnya pasal 18 mengenai otonomi daerah, dan pasal 28 mengenai kemerdekaan berpikir dan menyatakan pendapat, secara lisan dan tulisan. Soepomo yang amat idealis, meletakkan kepercayaan besar kepada apa yang disebutnya sebagai "semangat para penyelenggara negara". Sayangnya wawasan Soepomo ini tidak diimbangi oleh sistem pengamanan yang memadai, sehingga sistem pemerintahan yang dirancangnya demikian rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai seorang rohaniwan-budayawan, Mangunwijaya lebih menyukai menyampaikan kritik halus, tetapi tajam, melalui tulisan-tulisannya. Ia menengarai bahwa budaya Jawa, yang sering dipandang sebagai salah satu faktor penyebab penyimpangan kekuasaan aparatur penyelenggara negara, terdiri dari dua lapisan, yaitu budaya rakyat pedesaan yang dinamis dan demokratis, dan budaya kraton yang otoriter dan feodalistis. Dalam tahun-tahun terakhir ini, Mangunwijaya sangat gigih memperjuangkan konsep negara federal, suatu gagasan yang juga pernah diperjuangkan oleh Drs. Mohammad Hatta.

Apakah seluruh kekurangan hal itu berarti kita harus pasrah kepada hukum elitisme yang bagaikan hukum besi politik itu? Rasanya, tidaklah perlu. Bagaimana pun, dengan segala kekurangannya, demokrasi merupakan suatu wujud sistem pemerintahan modern yang bersifat inklusif dan membuka peluang paling besar bagi keterlibatan cukup banyak orang. Dengan perkataan lain, demokrasi mempunyai basis sosial yang paling luas dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoriter dan fasistis.

Kesimpulan dan Penutup

Pengalaman menunjukkan bahwa demokrasi tidak akan terwujud sendiri. Demokrasi harus diperjuangkan, khususnya terhadap kecenderungan serta terhadap kekuatan anti demokrasi, baik yang ada dalam diri kita sendiri maupun yang ada di luarnya. *Democracy is essentially a government by self-restraint*, demikian seorang bijak pernah berkata.

Dewasa ini kita di Indonesia beruntung oleh karena perjuangan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia sudah mengalami titik balik. Kekuatan pro demokrasi dan hak asasi manusia sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan anti demokrasi dan anti hak asasi

manusia.

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dalam tiga tahun terakhir ini MPR telah melakukan serangkaian amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945, dan akan melanjutkannya dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Tema dasar amandemen tersebut adalah pengurangan kekuasaan presiden dan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara menyeluruh, rangkaian amandemen ini telah mengubah seluruh paradigma sistem pemerintahan yang diletakkan oleh Soepomo dalam UUD 1945 tersebut.

Dalam kaitan dengan tindak lanjut proses demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini, secara bertahap, mereka yang melanggar hak asasi manusia telah dipanggil berdasar wewenang *subpoena* yang dimiliki berbagai komisi nasional hak asasi manusia, diperiksa baik secara *pro-justicia* maupun secara *nonjudicial*. Untuk kemudian dihadapkan ke depan pengadilan yang berwenang. Seluruh gerakan ini mempunyai sasaran akhir untuk membawa bangsa ini ke dalam suatu abad demokrasi yang lebih beradab dari yang pernah dipraktekkan dalam kurun sebelumnya.

Dalam kurun baru ini keberadaan pasukan paramiliter

yang berkonotasi militerisme serta fasisme itu layak dipertanyakan. Pasukan-pasukan tersebut cepat atau lambat harus dibubarkan, dan gejala awal ke arah itu harus dicegah dengan cepat. Untuk memperoleh dukungan pemilih, para politisi harus mengandalkan kemampuannya berkomunikasi secara sehat, dan menghentikan kegiatan pembodohan masyarakat dengan dalil-dalil yang irasional dan emosional.

Sebaliknya, pasukan militer reguler harus direkrut, dilengkapi serta dibiayai sesuai dengan standar profesional internasional, agar mereka tidak terpaksa melakukan hal yang neko-neko untuk dapat melakukan tugasnya. Mempunyai dan menggerakkan pasukan militer reguler memang mahal. Namun, seperti dikatakan pepatah Jawa, *jer basuki mawa beya*. Di dunia ini kelihatannya memang tidak ada 'makan siang gratis'. *There is no such thing as a free lunch*, demikian orang Inggris sering berkata.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance*. Cornell University Press. Ithana, New York.
- Arendt, Hannah. Ter. J.M. Soebiyanta. 1995. *Asal Usul*

- Totalitarianisme*. Jilid III Totalitarisme. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Bahar, Saafroedin Bahar. 1996. *Peranan Elite Sipil dan Elite Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat, 1945-1984*. Tesis Ph.D. pada Universitas Gadjah Mada. Belum diterbitkan.
- Brooker, Paul. 1995. *Twentieth-Century Dictatorships: The Ideological One-Party States*. The Macmillan Press. London.
- Eatsvell, Roger. 1995. *Fascism. A History*. Vintage Books. London.
- Gerth, H.H. dan C. Wright Mills, eds. 1958. *From Max Weber: Essays in Sociology*. Oxford University Press. New York.
- Giddens, Anthony dan David Held. Terj. Verdy R. Hadiz. 1987. *Perdebatan Klasik mengenai Kelompok, kekuasaan, dan Konflik*. Radjawali Pers. Jakarta.
- Gregory, Ann. 1976. *Recruitment and Factional Patterns of the Indonesian Political Elite: Guided Democracy and the New Order*. Tesis Ph.D. Columbia University.
- Hatta, Mohammad, 1966. *Demokrasi kita*. Pustaka Antara. Jakarta.
- Lacqueur, Walter. 1996. *Fascism, Past, Present, Future*. Oxford University Press. New York.
- Lubis, Mochtar. Ed. 1984. *Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno, 1957-1965*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Macchiavelli. Niccolo. Terj. C. Woekirsari. *Sang Penguas, Surat Seorang Negerawan kepada Pemimpin Republik*. Penerbit PT Gramedia. Jakarta.
- Michels, Robert. Terj. Mien Joebhaar. 1984. *Partai Politik dan Kecenderangan Oligarki dalam Birokrasi*. CV Radjawali, Jakarta.
- Geertz, Clifford, ed. 1963. *Old Societies and New States*. The Free Press. New York.
- Hart. B.H. Liddle. 1962. Ninth printing, *Strategy*. Frederick A. Praeger Publishers. New York.
- Malaka, Tat 1964. Cetakan Kedua. *Gerpolet Gerilya, Politik, Ekonomi*. Jajasan Massa, Jakarta.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Tesis M.A. Yayasan Obor Indonesia.

Jakarta.

Mosca, Gaetano. Transl. By Hannah D. Kahn. 1939, *The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica)*. McGraw Hill, New York.

Said, Salim. 1992. *Enesis of Power: General Soedirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49*. Tesis Ph.D. Institute of Southeast Studies. Singapore.

Sherman, Arnold, dan Aliza Kolker. 1987. *The Social Bases of Politics*. Wadsworth Publishing Com-

pany. Belmont. Calif.

Soekarno. Jilid I 1959 dan Jilid 2, 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi. Djakarta.

Sundhausen, Ulf. Terj. Hasan Basari. 1986. *Politik Militer di Indonesia, 1945-1967*. Tesis Ph.D. EP3ES. Jakarta.

Vagts, Alfred 1959. *A History of Militarism, Civilian and Military*. Meridian Books, Inc. New York.

